

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Kurnia Sewon	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Kurnia Sewon	2
A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Kurnia Sewon	2
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi	2
b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	5
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	6
d Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7
e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	8
f Rencana Strategi Bank	9
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	11
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	11
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi	12
5 Shares Option	13
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	13
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	13
8 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	14
9 Permasalahan Hukum	14
10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	14
11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	14
B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	14

LAMPIRAN

1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR KURNIA SEWON	
---	--

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT. BPR KURNIA SEWON TAHUN 2017

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR KURNIA SEWON

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :
 - a. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi.**
 - a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :
 1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sedangkan jumlah Direksi 1 (satu) orang.

2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : W. Boni Fredianto

2. Anggota Komisaris : Subagyo Nugroho

3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

✓ Direktur Utama : Daryadi

3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas jasa keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit

serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interent dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Kredit Macet tahun 2017.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan calon Penyedia Jasa Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Pemimpin PT. BPR Kurnia Sewon Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPR Kurnia Sewon tahun 2017
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan RBB tahun 2017

- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

b.1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

Audit Internal

- ✓ Ketua /Anggota: W. Boni Fredianto
- ✓ Anggota : Ir. H. Subagyo Nugroho
- ✓ Anggota : Eny Anita
- Audit Internal diketuai oleh Komisaris Utama
- Audit Internal berasal dari Karyawan BPR Kurnia Sewon yang diposisikan secara Independen.
- Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Pemantau Risiko

- Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari:
- ✓ Ketua/ Anggota : Ir. H. Subagyo Nugroho (Komisaris)
- ✓ Anggota : Sumarhadi
- ✓ Anggota : Sri Andaryati

Komite pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris dan seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite

Tugas dan tanggungjawab Audit Internal, Komite Pemantau Risiko, telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

GCG PT. BPR Kurnia Sewon dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. Kurnia Sewon

b.3. Frekuensi rapat Komite

- Telah diselenggarakan Rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik.
- Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan.

b.4 Program kerja Komite dan realisasinya

Audit Internal, Komite Peantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP GCG PT. BPR Kurnia Sewon Program Kerja Komite Dewan Komisaris.

c. **Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

c.1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan komite pemantau risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan komite pamantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris.
- Direktur dan pemantauan Risiko telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- Direktur dan Audit Internal serta komite pemantauan risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d. **Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

d.1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorasi risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Kurnia Sewon sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d.3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

d.4. Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.

e. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Kurnia Sewon
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

f. **Rencana Strategis Bank**

f.1. Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Penurunan NPL

Untuk mengendalikan Kualitas Aktiva Produktif agar selalu dalam kondisi yang sehat maka Bank menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Tingkat NPL sebesar 3% plus minus 0,5 basis point.
- b. Dibentuk unit remedial untuk menangani kredit yang telah menunggak di atas 180 hari.
- c. Membentuk tim *task force* yang bekerja penuh setiap tiga bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun.
- d. Meningkatkan efektifitas proses litigasi baik melalui PN dan KPKNL maupun melalui Kepolisian daerah setempat.

- Peningkatan Fungsi Intermediasi

Kegiatan utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yakni penghubung antara mereka yang menyimpan dananya dalam berbagai bentuk (Dana Pihak Ketiga) dengan masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Meningkatnya fungsi

intermediasi selalu terhubung dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank untuk menyimpan dana-dananya baik berupa tabungan maupun deposito. Disisi lain peningkatan peran bank sebagai lembaga intermediasi harus diimbangi dengan kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana-dana yang diperolehnya dalam bentuk kredit.

Untuk itu bank harus senantiasa menjaga keseimbangan pengelolaan DPK dengan Kredit mengingat pengelolaan DPK mengandung biaya (*cost of fund*) sedangkan satu-satunya sumber pendapatan Bank (revenue) berasal dari Kredit. Ukuran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi ini dikenal dengan istilah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Ukuran mana dipakai sebagai salah satu tolok ukur kesehatan Bank.

Data historis menunjukkan tingkat LDR Bank berkisar antara $84\% < LDR < 94\%$. Kisaran mana masih dalam kategori bank yang sehat. Peningkatan fungsi intermediasi bank untuk tahun 2017 tercermin dari kebijakan manajemen Bank sbb:

1. DPK naik sebesar 25%
2. Kredit naik 15%
3. Tingkat LDR pada kisaran sebesar $90\% < LDR < 94\%$

- Peningkatan Efisiensi

Kinerja sebuah perusahaan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan tersebut dalam menerapkan strategi yang efektif guna memastikan semua tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan. Untuk meningkatkan efisiensi maka bank harus mengenali dengan baik sumber-sumber inefisiensi, yang umumnya berasal dari:

1. Perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Biaya dana (*cost of fund*) merupakan komponen biaya terbesar yang harus dikeluarkan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Guna menurunkan komponen biaya dana ini maka langkah yang ditempuh adalah sbb:

- a. Mengurangi ketergantungan bank pada beberapa depositan terbesar dengan meningkatkan basis jumlah depositan.
- b. Mengurangi porsi DPK yang berasal dari deposito.

- c. Meningkatkan porsi DPK yang berasal dari tabungan.
- d. Peningkatan kinerja manajemen likuiditas.

2. Penyaluran Kredit

Efisiensi juga dapat diperoleh dari perbaikan dalam proses pemberian kredit. Kualitas kredit harus selalu dikelola dengan baik agar memberikan hasil yang maksimal. Setiap kredit yang diberikan harus selalu mempertimbangkan prinsip *prudential banking*, mitigasi risiko, tata kelola yang memenuhi standar *good and corporate governance* dan kemampuan aparat kredit (SDM).

3. Biaya Overhead

Porsi terbesar setelah biaya dana adalah biaya overhead. Biaya ini adalah seluruh biaya diluar biaya perolehan dana yang harus ditanggung bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Biaya overhead dibebankan pada seluruh asset bank. Dengan demikian porsi biaya ini dapat ditekan apabila peningkatan asset lebih besar dari peningkatan biaya overhead-nya.

Secara umum ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi kinerja sebuah bank bank dapat diukur dengan menggunakan besaran BOPO (Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return on Asset) dan ROI (Return on Investment). Bank makin efisien apabila nilai BOPO dan NPL turun serta ROA dan ROI meningkat. Mengacu pada ukuran tersebut, maka manajemen menetapkan kebijakan untuk RBB tahun 2017 sebagai berikut:

- BOPO maksimal sebesar 78%.
- NPL maksimal 3% plus minus 0,5%.
- ROA minimal sebesar 4%.
- ROI minimal sebesar 45%

Adapun factor lain yang masih mempengaruhi adalah :

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.

- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Kurnia Sewon jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 19,35% dan rasio LDR sebesar 90,03%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Kurnia Sewon
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar 23,45 %menjadi 51,93 Milyar (yoy).
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. Rencana jangka menengah tahun 2017

1) Finansial

- Mencapai rata-rata ROE di atas 15 %.

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
 - Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif
- 2) Customer
- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 10 %.
 - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR KURNIA SEWON
- 3) Karyawan
- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR KURNIA SEWON melalui *Competency Based Human Resources Management*.

1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan , dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR KURNIA SEWON ,sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR KURNIA SEWON menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR KURNIA SEWON.

- **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR KURNIA SEWON tidak memiliki saham pada PT. BPR KURNIA SEWON, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

- **Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR KURNIA SEWON secara tidak langsung memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KURNIA SEWON, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR KURNIA SEWON tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR KURNIA SEWON tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn						
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP		
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
W. Boni Fredianto	Komut		√		√	√					√	√		
Subagyo Nugroho	Komisa ris		√		√		√		√		√			√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Daryadi	Dirut		√		√		√		√		√		√

- **Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi**

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp. 416 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 112 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	Rp 190 Juta	1	Rp 226 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp. 3.840 ribu	1	Rp. 109 juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	2 orang

- **Share Option**

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

- **Rasio gaji Tertinggi dan Terendah**

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 23,40 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = - %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 62,91 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp. 9.940.000,00	RP. 6.253.000,00
2	Direksi	Rp. 27.985.165,00	0
3	Pegawai	RP. 7.244.473,00	Rp. 1.694.986,00

- **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

- e. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- g. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR KURNIA SEWON selama tahun 2017 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR KURNIA SEWON, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR KURNIA SEWON selama tahun 2017 adalah tidak ada.

B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR KURNIA SEWON periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.27 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.23
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	3	0.37
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2,33	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2,25	0.27
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.43
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	0	0
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Eksposure</i>)	7.50%	2	0.18
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.06
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.33
	Nilai Komposit	100.00 %		2.27
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR KURNIA SEWON, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR KURNIA SEWON tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan dan terima kasih.

PT. BPR KURNIA SEWON

W. Boni Fredianto
Komisaris Utama

Daryadi
Direktur Utama